



PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH

# RENJA 2026

DINAS PARIWISATA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

wonderful  
indonesia 





## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR: 000-7.2/251/Bappada - 9.51/2025

### TENTANG

### PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

#### GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c angka 3 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan **Rencana**

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 956);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubenrur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal ... 6 oktober 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

  
ANWAR HAFID



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2026

1. Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Renja Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Renja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Renja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah;
15. Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
18. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
19. Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Renja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
21. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;

22. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
23. Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
24. Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah;
26. Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
29. Renja Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah;
30. Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
31. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
32. Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
33. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
34. Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
35. Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
36. Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
37. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah;
38. Renja Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah;
39. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
40. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan RahmatNya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang menjadi usulan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah untuk dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran, dan sekaligus merupakan penjabaran dari Renstra.

Semoga dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Tahun 2026 ini bisa memberikan gambaran kepada semua pihak berkepentingan, khususnya Pemerintah Sulawesi Tengah tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2026.

**Palu, Desember 2025**

**KEPALA DINAS PARIWISATA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680825 199412 2 006**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penyusunan .....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra DINAS .....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	26
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	28
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	28
2.5. Penelaahan Usulan Program .....	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	34
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	34
3.2. Tujuan Dan Sasaran RENJA SKPD .....	35
3.3. Program Dan Kegiatan .....	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	38
BAB V P E N U T U P .....	44

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Daerah Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Daerah Tahun 2025-2029 dan rancangan awal RKPD 2026. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan melihat hasil kinerja perangkat daerah yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang terjadi pada tahun berjalan dan isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan lainnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain, dimulai dari tingkat kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah, sebagai implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Perangkat Daerah) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor Nomor 51);
14. Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor Nomor 51);
15. Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 75 Tahun 2016 tentang Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata.
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk :

- Meningkatkan kesinambungan dan korelasi dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Daerah dengan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah;
- Menjadi kontrol dalam pencapaian target tujuan Renstra Dinas Pariwisata Daerah;
- Menjadikan Dokumen Rencana Kerja sebagai dasar perumusan target kinerja dan penganggaran program kegiatan demi terwujudnya optimalisasi pencapaian manfaat.

#### **b. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah untuk memudahkan pelaksanaan Program kegiatan dan menjadi bahan masukan dan evaluasi untuk Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan semua Unsur Pimpinan yang ada dalam mengendalikan dan memutuskan kebijakan pembangunan pada tahun yang akan datang.

### **Sistematika Penyusunan**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

#### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V : PENUTUP**

### **BAB II**

## **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH PERANGKAT**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Pada Perangkat Daerah**

Target kinerja Dinas Pariwisata berdasarkan pada target indikator Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026 terdiri dari 5 program dan 15 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan pada tahun 2023. Secara keseluruhan mencapai target sebesar 100% yang berdasarkan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan katagori Sangat Baik.

Secara umum melihat capaian realisasi pelaksanaan Renja Tahun lalu khususnya Program teknis yang mencapai rata-rata 95%, hal ini mengalami peningkatan dari capaian indikator Renstra yang pada tahun 2023 secara keseluruhan juga mencapai rata-rata 90%. Namun begitu, tetap dilakukan evaluasi. Capaian kinerja tahun 2025 ini berdasarkan perubahan indikator pada Review Renstra karena adanya nomenklatur baru. Sehingga memudahkan pencapaian dan pengukuran indikator untuk menunjang capaian system merit pemerintah daerah.

Dengan terbitnya Permengadri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhitan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah keseluruhan program dan kegiatan mengalami perubahan nama dan indikator yang secara tidak langsung berdampak terhadap penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah. Dikarenakan berubahnya sPub kegiatan beserta indikatornya sehingga capaian indikator 2 tahun terakhir kami sajikan sebagaimana table 2.1 dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra**  
**Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)\***  
**Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun n- 2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (t-n)			Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2026	2023	2024			2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12=11/4
<b>3.26.02</b>	<b>PROGRAM : PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA DESTINASI PARIWISATA</b>	Rata-rata lama tinggal wisatawan (Hari)	<b>4</b>	<b>4</b>	4	4	1	4	4	12	3
<b>3.26.02. 1.01</b>	<b>Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Propinsi</b>	Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang terstandar pengelolaannya	<b>5</b>	<b>1</b>	1	1	1	1	1	3	0.6

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12=11/4
3.26.02.1.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26.02.1.01.02	Perencanaan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	5	1	-	-	-	-	-	1	0.2
3.26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pematapan, revitalisasi)	-	1	-	-	-	-	-	1	-
3.26.02.1.01.06	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	5	1	1	1	1	1	1	3	0.6

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12=11/4
3.26.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Propinsi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Propinsi	1	1	-	-	-	-	-	1	1
3.26.02.1.01.08	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Daya Tarik Wisata Propinsi	Jumlah pengelola daya tarik wisata yang ditingkatkan kapasitas SDM pengelolaan daya tarik wisata propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>3.26.02.1.02</b>	<b>Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Propinsi</b>	Jumlah Daya Tarik Wisata di KSP yang terstandar pengelolaannya	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
3.26.02.1.02.01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3	1	-	-	-	-	-	1	0.333

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12=11/4
3..26.02 .1.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2	1	1	1	1	2	2	4	2
3..26.02 .1.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	0	1	-	-	-	-	-	1	0
3..26.02 .1.02.04	Pengadaan/Pemeliha raan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3	-	4	4	1	1	1	5	1.667
3.26.02.1. 02.08	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Stretegis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Stretagis Pariwisata Provinsi	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3..26.02 .1.02.09	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelolaan Pariwisata Strategis Provinsi Yang Dikembangkan	150	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.26.02. 1.03</b>	<b>Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Propinsi</b>	<b>Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang terstandar pengelolaann</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12=11/4
3.26.02.1. 03.01	Penetapan Destinasi Pariwisata	Jumlah Dokumen Destinasi Pariwisata Provinsi yang ditetapkan	1	1	-	-	-	-	-	1	1
3..26.02 .1.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	4	1	-	-	-	-	-	1	0.25
3..26.02 .1.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pematapan, revitalisasi)	0	1	-	-	-	-	-	1	-
3..26.02 .1.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang tersedia dan terpelihara	3	1	1	1	1	1	1	3	1
3..26.02 .1.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Provinsi	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1	1	0	0	0	0	0	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12=11/4
3..26.02 .1.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang meneraokan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata	2	-	-	-	-	-	-	-	-
3..26.02 .1.03.08	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3..26.02 .1.03.09	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi	0	-	-	-	-	-	-	-	-
3..26.02 .1.03.01 0	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya peningkatan Kapsitas SDM Dalam pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	250	-	-	-	-	70	50	50	0.2
3..26.02 .1.03.01 1	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	30	-	-	-	-	70	65	65	2.167
3..26.02 .1.03.12	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3..26.02 .1.03.13	Fasilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan	Jumlah Dokumen yang memuat data dukung dalam rangka mendukung indeks Pembangunan Kepariwisataaan Nasional	1	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12=11/4
3..26.02 .1.03.13	Fasilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan	Jumlah Dokumen yang memuat data dukung dalam rangka mendukung indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.26.02.1.04</b>	<b>Kegiatan : Penetapan TDUP Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Propinsi</b>	<b>Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Pariwisata tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	-	-	-	-	-	30	-
3..26.02 .1.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	-	-	0	0	0	0	0	0	0
3..26.02 .1.04.04	Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	2	1	-	-	-	-	-	1	0.5
3..26.02 .1.04.07	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042-2021 (SNI CHSE)	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042-2021	0	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12=11/4
3.26.03.	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara</b>	<b>10,850,000</b>	<b>1,926,769</b>	5509000	9240942	1.677	9025000	11695483	22863194	2.11
3.26.03.	<b>Kegiatan</b> :Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Pemasaran Pariwisata, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4	7	7	7	1	5	5	19	4.75
3.26.03. 1.01. 01	Penguatan Promosi Melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	2	3	2	2	1	2	2	7	3.5
3.26.03. 1.01. 02	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	12	3	2	2	1	1	1	6	0.5

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12=11/4
3.26.03. 1.01. 03	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Provinsi, baik dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri	8	3	-	-	-	-	-	3	0.375
3.26.03. 1.01. 04	Peningkatan Kerjasama dan kemitraan Pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	5	2	-	-	-	-	-	2	0.4
3.26.03. 1.01. 05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	3		-	-	-	-	-	-	-
3.26.03. 1.01. 06	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	4		-	-	-	-	-	-	-

3.26.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>Jumlah Pelaku Ekraf yang mandiri dalam memanfaatkan layanan Hak Kekayaan Atas Intelektual</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>398</b>	<b>1.396</b>
3.26.04.	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>	Jumlah Pelaku Usaha Kota Kreatif yang memiliki sarana dan prasarana	285	285	105	105	1	14	14	404	1.418
3.26.04.1.01.01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif	7	7	0	-	-	-	-	7	1
3.26.04.1.01.02	Perluasan Pasar Produk Kreatif baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah laporan hasil pelaksanaan perluasan akses pasar produk kreatif baik pasar ekspor dan pasar domestik	1	1	2	-	-	1	1	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12=11/4
3.26.04.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	2	1	2	2	1	14	14	17	8.5
3.26.04.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif terutama bagi usaha pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif terutama bagi usaha pemula	2	2	2	2	1	1	1	5	2.5
<b>3.26.04.</b>	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	Jumlah Pelaku Ekraf yang berdaya saing	130	130	75	75	1	12	12	217	1.669
3.26.04.1.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1	1	-	-	-	-	-	1	1

3.26.04. 1.02.08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	1	1	1	1	1	1	1	3	3
3.26.04. 1.02.18	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	1	1	75	75	1	1	1	77	77
<b>3.26.05</b>	<b>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terstandarisasi</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	260	260	1	125	121	581	2.905

3. 26.05.1. 01	<b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan peningkatan kapasitas sdm pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan	Jumlah kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf Tingkat Lanjutan yang diberikan pelatihan	200 Orang	200 Orang	190 Orang	190 Orang	1	-	-	-	-
3.26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Orang Kompetensinya	40	50	-	-	-	-	-	50	1.25
3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Orang Kompetensinya	20	30	0	0	0	0	0	30	1.5

3.26.05. 1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide ) Tingkat Lanjutan	1	30	-	-	-	-	-	30	30
3. 26.05.1.01 .08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	0	0	-	-	-	-	-	-	-
3. 26.05.1.01 .015	Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan Bagi Pemerintah Daerah	Jumlah orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan		0	140	140	1	30	30	170	0
3. 26.05.1.01 .016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan kapasitas berdasarkan KSSNI		0	50	50	1	30	30	80	-
3. 26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Presentase Pelaku Ekraf Yang mandiri		0	70	70	1	65	61	131	-

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12=11/4
3.26.05.1.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif		0	50	50	1	40	36	86	-
3.26.05.1.02.03	Standarisasi Usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif	Jumlah orang yang disertifikasi kompetensi di bidang ekonomi kreatif		0	20	20	1	25	25	45	-
<b>3.26.01</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>66.5</b>	<b>66.5</b>	68.5	68.5	1	70	35.65	170.65	2.57
<b>3.26.01.1.01</b>	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	<b>82</b>	<b>80</b>	84	81	0.964	86	86	247	3.01
3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	7	7	1	7	7	21	3

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12=11/4
3.26.01. 1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26.01. 1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.26.01. 1.02</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungj awaban Keuangan	<b>97</b>	<b>3</b>	3	3	1	3	3	9	0.09
3.26.01. 1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63	63	63	63	1	63	63	189	3

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12=11/4
3.26.01. 1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	12	1	12	12	36	3
3.26.01. 1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	1	1	1	3	3
<b>3.26.01. 1.03</b>	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<b>2</b>	<b>2</b>	2	2	1	2	2	6	3
3.26.01. 1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<b>2</b>	<b>2</b>	2	2	1	2	2	6	3

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12=11/4
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	85	12	12	12	1	12	12	36	0.42
3.26.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	2	-	-	-	-	1	1	1	0.5
3.26.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	1	1	1	0
3.26.01.1.05.06	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun Yang di Pulangkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan sesuai Tugas dan fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	71	12	59	59	1	59	59	130	1.83
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	14	12	12	12	1	4	4	28	2

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12=11/4
3.26.01. 1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	1	1	1	1	2	2	4	2
3.26.01. 1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	1	1	1	3	0.6
3.26.01. 1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	3	3	3	2	2	8	2.67
3.26.01. 1.06.09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	4	4	4	3	3	11	2.75

Realisasi IKU/IKK yang telah dilaksanakan secara umum semua terlaksana dengan baik sesuai harapan. Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sulawesi Tengah berjumlah 26.550 Orang atau naik sebesar 106.2%. Sedangkan jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara ke Sulawesi Tengah pada Periode November 2025 berjumlah 11.668.933 orang atau naik sebesar 87.52%.

Perbandingan Jumlah Kenaikan Kunjungan Wisatawan

NO.	URAIAN	JUMLAH KUNJUNGAN	
		WISMAN	WISNUS
1.	Tahun 2020	848	475.746
2.	Tahun 2021	1.085	713.618
3.	Tahun 2022	3.280	1.317.958
4.	Tahun 2023	8.382	5.139.979
5.	Tahun 2024	22.293	8.246.947
6.	Tahun 2025	28.165	11.668.933

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Pariwisata Prov.Sulteng

Tahun 2025 Jumlah pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang diperoleh dari kontribusi pariwisata terhadap Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dan Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	Periode Tahun	Rasio PDRB Penyediaan Makan dan Minum	Proporsi Ekonomi Kreatif Terhadap ADHB
1.	2024	0.32	-
2.	2025	0.31	-

Sumber Data: BPS dan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sulteng**

Kineja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2026, dapat dilihat pada table berikut ini :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Rencana Kerja Tahun 2026**

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Capaian Awal Tahun 2024	Baseline Tahun 2025	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi Renja	Pengampu	Catatan Analisis
				Tahun					Tahun 2025	Tahun 2026		
				2026 (thn n)	2027 (thn+1)	2028 (thn+2)	2029 (thn+3)	2030 (thn+4)	Thn-1	Thn n		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,32	0.34	0.37	0.4	0.42	0.45	0.48	0.31	0.37	Bidang Destinasi	
2	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	23,973	25,000	28,750	33,000	38,000	43,700	50,300	28,165	28,750	Bidang Pemasaran Pariwisata	
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB (%)	-	3,76	3,845	3,93	4,015	4,01	4,185		3,845	Bidang Ekraf	
4	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Hari)	3,75	3 - 5	3 - 5	3 - 5	5 - 7	5 - 7	5 - 7	1.57	3 - 5	Bidang Pemasaran Pariwisata	
5	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Per kunjungan/orang (US \$)	-	500	600	700	800	900	1000	447.12	600	Bidang Destinasi Pariwisata	
6	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (Juta Orang)	9,216,969	9,000,000	9,925,000	10,850,000	11,775,000	12,700,000	13,625,000	11,668,933	9,925,000	Bidang Pemasaran Pariwisata	
7	Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Pariwisata (Orang)		8,418	9,259	10,184	10,285	10,387	10,490	84,570	9,259	Bidang SDM	
8	Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Usaha Pariwisata Yang Tersertifikasi (Orang)	145	100	200	300	400	500	600	61	200	Bidang SDM	
9	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp)	111,400,000,000	125,000,000,000	139,781,000,000	154,954,000,000	170,127,000,000	185,300,000,000	200,473,000,000		139,781,000,000	Bidang Ekraf	
10	Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Ekonomi Kreatif	-	2,338	2,571	2,828	3,110	3,421	3,763	2,919	2,571	Bidang SDM	
11	Jumlah Tenaga Kerja/Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Yang Tersertifikasi (Orang)	-	100	200	300	400	500	600	60	200	Bidang SDM	

**Catatan :** Capaian Rasio PDRB Penyediaan Akmamin Masih Sampai Triwulan II Tahun 2025

**Sumber Data :** BPS dan Dinas Pariwisata Prov. Sulteng

### **2.3. Isu-isu Penting Strategis Perangkat Daerah**

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan yang ada dan telaahan visi dan misi pembangunan pariwisata, sasaran jangka menengah sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka sudah tergambar dengan jelas tentang pelayanan OPD Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah. Dari gambaran pelayanan tersebut bila ditinjau dari aspek implikasi RTRW dan KLHS, dapat dikemukakan hal-hal penting yang akan menjadi agenda Prioritas dalam Pembangunan Pariwisata Sulawesi Tengah.

Beberapa isu strategis yang perlu dikemukakan yaitu :

1. Rendahnya Daya Saing Sektor Pariwisata;
2. Keanekaragaman wisata bahari, alam dan budaya belum terintegritas secara optimal;
3. Keterbatasan sarana pendukung (bandara, pelabuhan, hotel, restoran, akses, jalanan)
4. Belum ada paket wisata bernilai tambah yang mendorong pusat-pusat ekonomi baru;
5. Perlunya peningkatan daya saing melalui promosi terarah, kualitas destinasi, SDM dan investasi;
6. Pentingnya menjaga kualitas lingkungan (carrying capacity) dan kesiapsiagaan bencana di daerah wisata.

### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 seluruh program Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya dari rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Tengah meski telah sesuai dengan dokumen Renstra namun masih terdapat beberapa target yang perlu disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada.

Renja Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung

pencapaian visi dan misi program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No.	Program /Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Usulan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	Indeks Reformasi Birokrasi	68,5	Rp 12,195,967,453	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	Indeks Reformasi Birokrasi	68,5	Rp 12,195,967,453	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Dinas	81	291,030,076	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Dinas	81	291,030,076	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	291,030,076	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	291,030,076	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	3	8,515,989,304	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	3	8,515,989,304	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji, Tunjangan TPP	63	8,248,289,304	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji, Tunjangan TPP	63	8,248,289,304	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	136,080,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	136,080,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Layanan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	131,620,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Layanan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	131,620,000	
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	137,287,000	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	137,287,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	137,287,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	137,287,000	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	139,115,000	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	139,115,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Pegawai Yang Tersedia	1	60,375,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Pegawai Yang Tersedia	1	60,375,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Data dan Informasi Yang Terpenuhi	1	72,300,000			Jumlah Data dan Informasi Yang Terpenuhi	1	72,300,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang Yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46	6,440,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang Yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46	6,440,000	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan barang dan jasa	12	356,827,023	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan barang dan jasa	12	356,827,023	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	5,000,140	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	5,000,140	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Pelengkapan Kantor Yang Disediakan	1	70,567,928	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Pelengkapan Kantor Yang Disediakan	1	70,567,928	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	31,232,974	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	31,232,974	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	250,025,981	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	250,025,981	

	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pengadaan barang dan milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3	162,191,000	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pengadaan barang dan milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3	162,191,000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kabatan	1	33,862,000			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kabatan	1	33,862,000
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	1	26,845,000			Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	1	26,845,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya Yang Disediakan	1	101,484,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya Yang Disediakan	1	101,484,000
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	2,070,466,250	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	2,070,466,250
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	258,620,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	258,620,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	1,811,846,250	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	1,811,846,250
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	4	523,061,800.00	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	4	523,061,800.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kenadaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pejakannya	15	257,307,700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kenadaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pejakannya	15	257,307,700
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	37	10,330,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	37	10,330,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	255,424,100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	255,424,100
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Kab. Sulawesi Tengah, Jakarta	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	4	1,725,887,100	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	4	1,725,887,100
	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang terstandar pengeloalaannya	1	243,735,600.00	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang terstandar pengeloalaannya	100%	243,735,600.00
	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Kab. Banggai Laut dan Buol	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tari, Wisata Provinsi Yang Sah dan Legal Ditetapkan Kepala Daerah	1	243,735,600.00	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tari, Wisata Provinsi Yang Sah dan Legal Ditetapkan Kepala Daerah	1	243,735,600.00
	Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Dokumen Destinasi Wisata Memiliki Amenitas Yang Baik	1	775,465,000.00	Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Dokumen Destinasi Wisata Memiliki Amenitas Yang Baik	1	775,465,000.00

	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Kab. Touna, dan Poso	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1	724,340,000.00	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1	724,340,000.00	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Kab. Sigi dan Poso	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2	51,125,000.00	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2	51,125,000.00	
	<b>Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>		Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi Yang Standar pengelolaannya	1	<b>706,686,500</b>	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi Yang Standar pengelolaannya	1	<b>706,686,500</b>	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Kab. Sigi, Parimo, Toli-Toli dan Buol	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Yang Tersedia dan Terpelihara	2	166,999,999	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Yang Tersedia dan Terpelihara	2	166,999,999	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Kab. Toli-Toli, Morut dan Balut	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang dikembangkan	30	387,841,500	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang dikembangkan	30	387,841,500	
	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi		Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi pariwisata		151,845,000	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi		Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi pariwisata		151,845,000	
3	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	1	<b>927,948,750</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	1	<b>927,948,750</b>	
	<b>Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>		Jumlah pemasaran pariwisata, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi	7	<b>927,948,750</b>	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah pemasaran pariwisata, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi	7	<b>927,948,750</b>	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Cetak, Electronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1	223,438,750	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Cetak, Electronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1	223,438,750	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1	704,510,000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1	704,510,000	

4	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	Tercapainya Pelaku kreasi yang mandiri dan memanfaatkan layanan hak atas kekayaan intelektual	8	465,286,000	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	Tercapainya Pelaku kreasi yang mandiri dan memanfaatkan layanan hak atas kekayaan intelektual	8	465,286,000
	<b>Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>		Jumlah pelaku usaha kota kreatif yang terfasilitasi	3	295,976,000	<b>Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>		Jumlah pelaku usaha kota kreatif yang terfasilitasi	3	295,976,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	1	20,506,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	1	20,506,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	1	33,324,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	1	33,324,000
	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik		Jumlah Dokumen Promosi Yang Dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1	242,146,000	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik		Jumlah Dokumen Promosi Yang Dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1	242,146,000
	<b>Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang berdaya saing	80	169,310,000.00	<b>Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>		Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif	80	169,310,000.00
	Perlindungan Hasil Kreativitas		Terfasilitasinya Kebutuhan Ruang Kreatif Bagi Pelaku Usaha Fashion Untuk Promosi	50	90,000,000.00	Perlindungan Hasil Kreativitas		Terfasilitasinya Kebutuhan Ruang Kreatif Bagi Pelaku Usaha Fashion Untuk Promosi	50	90,000,000.00
	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual		Jumlah Bagi Pelaku Usaha Kuliner Yang Dipromosikan	30	79,310,000.00	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual		Jumlah Bagi Pelaku Usaha Kuliner Yang Dipromosikan	30	79,310,000.00
5	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi	240	1,250,200,000	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi	240	1,250,200,000
	<b>Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>		Jumlah kapasitas SDM pariwisata dan ekraf yang terstandarisasi	90	481,053,930.00	<b>Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>		Jumlah kapasitas SDM pariwisata dan ekraf yang terstandarisasi	90	481,053,930.00
	Diklat Tehnis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah		Jumlah Orang Aparatur Pemerintah Daerah Yang Mendapatkan Diklat Tehnis Kepariwisataan	30	178,640,310	Pendampingan Penciptaan Produk Kreatif (Inkubasi)		Jumlah Orang Aparatur Pemerintah Daerah Yang Mendapatkan Diklat Tehnis Kepariwisataan	30	178,640,310
	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI		Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan pada SKKNI	60	302,413,620	Diklat Tehnis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah		Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan pada SKKNI	60	302,413,620
	<b>Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>		Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang mandiri	155	769,146,070.00	<b>Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>		Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang mandiri	155	769,146,070.00
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	130	593,026,905	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	130	593,026,905
	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif		Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Tersertifikasi	25	176,119,165	Pelatihan Asessor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsellor Ekonomi Kreatif		Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Tersertifikasi	25	176,119,165
<b>JUM LAH</b>					<b>Rp 16,565,289,303.00</b>	<b>Rp 16,565,289,303.00</b>				

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas pariwisata tahun 2026 dilaksanakan secara terkoordinasi sebagai bagian dari tahapan penyusunan RKPD, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan serta sasaran dan indicator kinerja perangkat daerah. Proses penelaahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa usulan yang dhimpun dari masyarakat selaras dengan dokumen perencanaan daerah, mendukung pencapaian target pembangunan sektor pariwisata, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta prinsip efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik		
	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Jumlah Pelaku Usaha Kreatif Yang Memiliki Sarana dan Prasarana		
	- Peralatan Kuliner Pembuatan Kue	Desa Budi Mukti, Kec. Dampelas Kab. Donggala		1 Kelompok	
	- Peralatan/Perlengkapan Kesenian pada sanggar Seni	Jl. Sulawesi Lorong Sintuwu I, Kelurahan Lolu Utara Kec. Palu Timur		1 Kelompok	
	- Peralatan/Perlengkapan Kesenian pada sanggar Seni	Jl. Abd. Rahman Saleh BTN Mutiara Indah Blok CC1 No. 1 Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu		1 Kelompok	

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Arahan kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2026 Pemerintah berkomitmen agar belanja negara baik pusat maupun daerah harus difokuskan pada program-program prioritas nasional yang merujuk pada Asta Cita Presiden. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dengan tema “ kedaulatan pangan dan energy serta ekonomi yang produktif dan inklusif”. Prioritas Pembangunan Tahun 2026 menekankan tiga pesan utama yaitu :

1. Meneguhkan kedaulatan pangan dan air;
2. Mendorong produktivitas ekonomi melalui hilirisasi, transformasi digital dan penguatan daya saing;
3. Menjamin inklusivitas pembangunan agar tidak ada warga yang tertinggal. Program prioritas unggulan yang diusung antara lain program makan bergizi, pembangunan 3 juta unit rumah, koperasi desa merah putih, sekolah rakyat dan digitalisasi Pendidikan, program pengurangan kemiskinan terpadu serta pengelolaan sampah terpadu.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menyelaraskan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sekaligus mengintegrasikan program lintas sector guna mencapai target pembangunan nasional dan daerah. RKPD Tahun 2026 mengusung tema “ Berani Meningkatkan Produktivitas Pertanian dan Industri untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif” tema ini sejalan dengan prioritas nasional untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pembangunan SDM unggul. Ada Sembilan (9) program Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah yaitu : Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Makmur, Berani Berkah, Berani Harmoni dan Berani Berintegritas. Masing-masing menarget sektor Pendidikan, kesehatan hingga birokrasi.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Peringkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5			6	7	
1	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi		68	10,009,457,000.62	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70	13,280,676,280.82
	3.26.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Dinas		84	49,830,000.00				785,000,000.00
	3.26.01.01.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	49,830,000.00			7	500,000,000
	3.26.01.01.01.0008	Pelaksanaan pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah		0	-			16	150,000,000
	3.26.01.01.01.010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata		0	-			1	135,000,000
	3.26.01.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		2	9,292,412,528.00				8,700,000,000.82
	3.26.01.01.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji, Tunjangan TPP		63	9,197,332,528.00			63	8,400,000,000.82
	3.26.01.01.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	70,080,000.00			12	140,000,000.00
	3.26.01.01.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Layanan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2	25,000,000.00			1	160,000,000.00

3.26.01.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								190,000,000.00
3.26.01.01.06.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD					2		190,000,000.00
3.26.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								237,100,000.00
3.26.01.01.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan					1		65,000,000.00
3.26.01.01.05.0004	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian					1		125,000,000.00
3.26.01.01.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan					63		31,500,000.00
3.26.01.01.05.0010	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan					63		15,600,000.00
3.26.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang dan jasa	4	56,062,272.63					446,024,630.00
3.26.01.01.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	5,010,039.61			2		16,000,000.00
3.26.01.01.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1	32,894,154.00			1		95,000,000.00
3.26.01.01.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	18,158,079.02			4		35,024,630.00
3.26.01.01.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					4		300,000,000.00

3.26.01.01.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>290,000,000.00</b>
3.26.01.01.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan						1	90,000,000.00
3.26.01.01.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan						1	100,000,000.00
3.26.01.01.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan						1	100,000,000.00
3.26.01.01.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4	388,323,799.99					<b>1,940,273,250.00</b>
3.26.01.01.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	216,499,999.99				4	315,052,000.00
3.26.01.01.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	4	171,823,800.00				4	1,625,221,250.00
3.26.01.01.09	<b>Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4	<b>222,828,400.00</b>					<b>692,278,400.00</b>
3.26.01.01.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pejakanya	13	208,958,400.00				13	364,278,400.00
3.26.01.01.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	28	13,870,000.00				28	28,000,000.00
3.26.01.01.09.00010	<b>Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya</b>	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	0	-				1	300,000,000.00

2	3.26.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)		1	267,882,095.40	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6,092,790,000.00
	3.26.02.1.01	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</b>				-				2,470,000,000.00
	3.26.02.01.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi					2		70,000,000.00
	3.26.02.01.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah lokasi daya tarik wisata provinsi yang dilakukan pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana dalam daya tarik wisata provinsi					7		1,000,000,000.00
	3.26.02.01.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata provinsi yang sah dan legal ditetapkan kepala daerah					2		500,000,000.00
	3.26.02.01.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Data Tarik Wisata Provinsi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata provinsi					1		600,000,000.00
	3.26.02.01.01.0008	Peningkatan kapasitas SDM pengelola daya tarik wisata provinsi	Jumlah pengelola daya tarik wisata yang ditingkatkan kapasitasnya					75		300,000,000.00
	3.26.02.1.02	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Destinasi Wisata Memiliki Amenitas Yang Baik		1	100,000,000.10				922,790,000.00
	3.26.02.1.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya dokumen penetapan kawasan strategis pariwisata provinsi					1		150,000,000.00

3.26.02.1.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi		1	100,000,000.10			2	210,000,000.00
3.26.02.1.02.0004	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi						4	225,000,000.0000
3.26.02.1.02.0008	Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi						1	37,790,000.00
3.26.02.1.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pengelola pariwisata strategis provinsi yang dikembangkan	Jumlah orang pengelola pariwisata strategis provinsi yang dikembangkan						200	300,000,000.00
<b>3.26.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi Yang Standar pengelolaannya		1	167,882,095.30				<b>2,700,000,000.00</b>
3.26.02.1.03.0001	Penetapan Destinasi pariwisata provinsi	Jumlah destinasi pariwisata provinsi yang dikembangkan						2	50,000,000.00
3.26.02.1.03.0002	Perencanaan destinasi pariwisata provinsi	Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata provinsi						1	100,000,000.00
3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia dan Terpelihara Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		3	167,882,095.30			1	200,000,000.00

	3.26.02.1.03.0007	Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi	Jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata						1	150,000,000.00
	3.26.02.1.03.0008	Perencanaan destinasi pariwisata MICE provinsi	Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata MICE Provinsi						1	100,000,000.00
	3.26.02.1.03.0009	Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah provinsi	Jumlah dokumen rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah provinsi						3	1,000,000,000.00
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi pariwisata provinsi	Jumlah orang pengelola pariwisata pengelola destinasi pariwisata provinsi						60	300,000,000.00
	3.26.02.1.03.0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Jumlah kegiatan jejaring tata kelola destinasi pariwisata						2	400,000,000.00
	3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata provinsi						2	250,000,000.00
	3.26.02.1.03.0013	Fasilitasi pengumpulan data dukungan dalam indeks pembangunan	Jumlah dokumen yang memuat data dukung dalam rangka mendukung indeks pembangunan kepariwisataan nasional						2	150,000,000.00
<b>3</b>	<b>3.26.03</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara</b>		9,953,750	145,540,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			<b>7,218,550,000.00</b>
	<b>3.26.03.1.01</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	<b>Jumlah pemasaran pariwisata, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi</b>		<b>5</b>	<b>145,540,000.00</b>	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			<b>7,218,550,000.00</b>
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		2	37,940,000.00			2	2,000,000,000.00

3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan evaluasi pengembangan pem asaran pariwisata	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pem asaran pariwisata						2	218,550,000.00
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pem asaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4		107,600,000.00			4	5,000,000,000.00
3.26.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Tercapainya Pelaku kreasi yang mandiri dan memanfaatkan layanan haki atas kekayaan intelektual			3,607,056,100.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5,276,844,145.00
3.26.04.1.01	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>	Jumlah pelaku usaha kota kreatif yang terfasilitasi			3,600,056,100.00				1,952,432,333.65
3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang kreatif	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang krearis dan jaringan orang kreatif						1	105,536,882.90
3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi usaha kreatif sepanjang rantai produksi dengan menyediakan akses ke sumber permodalan atau pasokan SDM produksi dan pasar	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi usaha kreatif sepanjang rantan produksi dengan menyediakan akses ke sumber permodalan atau pasokan SDM produksi dan pasar						1	263,842,207.25
3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula						2	263,842,207.25
3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka perluasan akses pasar produk kreatif baik pasar ekspor dan pasar domestik	2		3,600,056,100.00			2	1,319,211,036.25

		<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	<b>Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif</b>		<b>10</b>	<b>7,000,000.00</b>	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			<b>3,324,411,811.35</b>
3.26.04.1.02.0005		Pengembangan sistem pemasaran	Jumlah dokumen hasil pengembangan sistem pemasaran ekonomi kreatif					1		52,768,441.45
3.26.04.1.02.0012		Penyusunan Dokumen Strategis bidang ekonomi kreatif	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi daerah					1		263,842,207.25
3.26.04.1.02.0013		Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual		10 Orang	2,000,000.00		150		105,536,882.90
3.26.04.1.02.0015		Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah					1		263,842,207.25
3.26.04.1.02.0017		Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif		1	5,000,000.00		1		2,638,422,072.50
<b>3.26.05</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi		<b>45</b>	<b>295,266,340.00</b>	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			<b>3,115,000,000.00</b>
<b>3.26.05.1.01</b>		<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>	<b>Jumlah kapasitas SDM pariwisata dan ekraf yang terstandarisasi</b>		<b>20</b>	<b>169,121,365</b>	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			<b>1,665,000,000.00</b>
3.26.05.1.01.0007		Fasilitasi pendirian lembaga sertifikasi profesi (LSP) P1 dan P3 bidang pemasaran	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendirian lembaga sertifikasi profesi (LSP) P1 dan P3 bidang pariwisata					1		100,000,000.00

3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi proses kreasi, produksi distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif					1	100,000,000.00
3.26.05.1.01.0011	Pendampingan penciptaan produk kreatif	Jumlah produk kreatif					1	200,000,000.00
3.26.05.1.01.0012	Pelatihan asesor kompetensi/workplace assesor (WPA) bidang pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan asesor kompetensi/workplace assesor (WPA)					95	200,000,000.00
3.26.05.1.01.0013	Pelatihan perpanjangan lisensi asesor/recognition current competencies (RCC) bidang pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan perpanjangan lisensi asesor/recognition current competencies (RCC)					20	200,000,000.00
3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata					30	300,000,000.00
3.26.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	20	169,121,365.00			314	415,000,000.00
3.26.05.1.01.00167	Pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif					95	150,000,000.00
<b>3.26.05.1.02</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>20</b>	<b>126,144,975.00</b>				<b>1,450,000,000.00</b>
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan dan bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif					80	450,000,000.00

3.26.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sirtifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang disertifikasi kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	25	126,144,975.00			95	600,000,000.00
3.26.05.1.02.0004	Pelatihan perpanjangan lisensi asesor/recognition current competencies (RCC) subsektor ekonomi kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan perpanjangan lisensi asesor/recognition current competencies (RCC) subsektor ekonomi kreatif					20	200,000,000.00
3.26.05.1.02.0005	Pelatihan asesor kompetensi/workplace asseor (WPA) subsektor ekonomi kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan asesor kompetensi/work place asseor (WPA) subsektor ekonomi kreatif					30	200,000,000.00
<b>JUMLAH</b>					<b>14,325,201,536.02</b>			<b>34,983,860,425.82</b>

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 mengacu pada Renstra Tahun 2025-2029 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026 selaras dengan visi, misi serta tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Berikut beberapa tujuan Renja Tahun 2026 :

- Merencanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran serta indikator kinerja yang ada dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Menetapkan prioritas pembangunan daerah yang harus dilaksanakan pada tahun 2026, yang sejalan dengan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Menyusun anggaran yang optimal untuk mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan, dengan memprioritaskan program yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan daerah.

Sasaran Rencana Kerja (Renja) fokus pada pencapaian prioritas pembangunan daerah yang telah diidentifikasi dalam RPJMD 2025-2029 untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Maka implementasi pencapaian sasaran dalam Rancangan Akhir Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**

#### **SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2026
1	Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	0,37
2	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	28.075
3	Meningkatnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB	3,845

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Perumusan Program dan kegiatan tahun 2026 didasarkan pada Renstra dan RKPD Tahun 2025. Program dan kegiatan dikelompokkan sesuai fungsi program dan kegiatan yang mencerminkan hasil yang dapat diukur maka Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai 5 program dan 13 kegiatan sesuai target sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2026.

Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 disusun berdasarkan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
  - a. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
  - a. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
  - b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
  - c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
  - a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN INTELEKTUAL
  - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana
  - b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

5. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
  - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
  - b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan pendanaan terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada pada tahun awal perencanaan 2025 dan target kinerja program dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan program kegiatan dan indikator yang telah dipetakan dapat tabel di bawah ini :

**TABEL 4.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**PERIODE 2026**

SASARAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2025)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 2026			
						TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	1. Nilai SAKIP 2. TLHP BPK Dan APIP 3. Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah				17,473,623,806.89		14,325,201,536.26	Dinas Pariwisata	
		3.26.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi PD</b>	11,955,791,937.37	68,5	10,009,457,000.86		
		3.26.01.01.01	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP Dinas	477,974,850	81	49,830,000.00		
		3.26.01.01.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	477,974,850	7 Dokumen	49,830,000.00		
		3.26.01.01.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Daerah	8,455,558,278.10		9,292,412,528.24		
		3.26.01.01.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji, Tunjangan dan TPP	8,167,073,278.10	63 Orang/Bulan	9,197,332,528.24		
		3.26.01.01.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	130,080,000	12 Dokumen	70,080,000		
		3.26.01.01.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	158,405,000	1 Laporan	25,000,000		
		3.26.01.01.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	107,507,500		-		
		3.26.01.01.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	107,507,500		-		
		3.26.01.01.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	128,311,000		-		
		3.26.01.01.05.0002	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	59,800,000		-		
		3.26.01.01.05.0004	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</b>	Jumlah Dikumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	65,911,000		-		
		3.26.01.01.05.0005	<b>Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	Jumlah, Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-		

		3.26.01.01.05.0009	<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	63 Orang	-		
		3.26.01.01.05.0010	<b>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	2,600,000	63 Orang	-		
		<b>3.26.01.01.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan barang dan jasa	232,697,370		56,062,272.63		
		3.26.01.01.06.0001	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12,481,300	2 Paket	5,010,039.61		
		3.26.01.01.06.0002	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	80,427,730	1 Paket	32,894,154.00		
		3.26.01.01.06.0005	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	23,411,349.97	4 Paket	18,158,079.02		
		3.26.01.01.06.0009	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116,376,990		-		
		<b>3.26.01.01.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah laporan pengadaan barang dan milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	52,496,600		-		
		3.26.01.01.07.0001	<b>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	-		-		
		3.26.01.01.07.0005	<b>Pengadaan Mebel</b>	Jumlah paket Mebel Yang Disediakan	32,303,600		-		
		3.26.01.01.07.0006	<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang disediakan	20,193,000		-		
		<b>3.26.01.01.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1,760,791,875	4	388,323,799.99		
		3.26.01.01.08.0002	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang disediakan	269,835,000	4 Laporan	216,499,999.99		
		3.26.01.01.08.0004	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1,490,956,875	4 Laporan	171,823,800.00		
		<b>3.26.01.01.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	740,454,464.30		222,828,400		
		3.26.01.01.09.0001	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	236,565,850	13 Unit	208,958,400		
		3.26.01.01.09.0006	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	34,330,000	28 Unit	13,870,000		
		3.26.01.01.09.0010	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya</b>	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	469,558,614		-		

Terwujudnya Industri Pengolahan Berbasis Sumber Daya Alam Sebagai Penggerak Ekonomi Yang Berdaya Saing	3.26.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Rata-rata lama tinggal wisatawan	<b>1,792,365,822.52</b>	4	<b>267,882,095.40</b>		
	1. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum (%)	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah daya tarik wisata provinsi yang terstandar pengelolannya	<b>377,702,000.00</b>	1	-	
	2. Jumlah Wisatawan Mancanegara	3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	-		-	
	3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB (%)	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi Yang Dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	-		-	
	3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi Yang Sah dan Legal di Tetapkan Kepala Daerah	377,702,000.00		-		
	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	-		-		
	3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata Yang Ditingkatkan Kapasitas	-		-		
	<b>3.26.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	<b>Jumlah dokumen destinasi wisata memiliki amenesti yang baik</b>	<b>738,491,298.50</b>	<b>1</b>	<b>100,000,000.10</b>		
	3.26.02.1.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya dokumen penetapan kawasan strategis pariwisata provinsi	-		-		
	3.26.02.1.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi	735,891,298.50	1 Dokumen	100,000,000.10		
	3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang tersedia dan Terpelihara Dalam Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi	2,600,000.00		-		
	3.26.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi Yang Menerapkan Destinasi pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-		-		
	3.26.02.1.02.0008	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evlauasi Pengelolaan Strategis Pariwisata Provinsi	-		-		
	3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi Yang diKembangkan	-		-		
	<b>3.26.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>	<b>Jumlah destinasi pariwisata provinsi yang standar pengelolannya</b>	<b>676,172,524</b>		<b>167,882,095</b>		

3.26.02.1.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi Yang Ditetapkan	-		-		
3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-		-		
3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang tersedia dan Terpelihara Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	349,392,524.00	3 Unit	167,882,095.30		
3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi	-		-		
3.26.02.1.03.0008	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi	-		-		
3.26.02.1.03.0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	-		-		
3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	214,103,000.02		-		
3.26.02.1.03.0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	112,677,000		-		
3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-		-		
3.26.02.1.03.0013	Fasilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional	Jumlah dokumen yang memuat data dukung dalam rangka mendukung Indeks Pembangunan	-		-		
<b>3.26.03</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	<b>1,478,221,150</b>	9,953,750	<b>145,540,000</b>		
<b>3.26.03.1.01</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	Jumlah pemesanan pariwisata, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi	<b>1,478,221,150</b>	5	<b>145,540,000</b>		
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	479,279,350	2 Dokumen	37,940,000		
3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran	-		-	-	
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	998,941,800	4 Kegiatan	107,600,000		

3.26.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Tercapainya pelaku kreasi yang mandiri dan memanfaatkan layanan hak atas kekayaan intelektual	1,257,772,122		3,607,056,100		
3.26.04.1.01	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>	<b>Jumlah pelaku usaha kota kreatif yang terfasilitasi</b>	1,213,902,122	1	3,600,056,100		
04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang	1,025,727,320		-		
04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	1,830,000		-		
3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	186,344,802	2	3,600,056,100		
	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	<b>Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berdaya saing</b>	43,870,000	1	7,000,000		
3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	34,870,000.00		-		
3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	9,000,000.00	10	2,000,000		
3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	1	5,000,000		
3.26.05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi	989,472,775	45	295,266,340		
3.26.05.1.01	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>	<b>Jumlah kapasitas SDM pariwisata dan ekraf yang terstandarisasi</b>	401,889,467	20	169,121,365		
3.26.05.1.01.0007	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1	-		-		
3.26.05.1.01.0011	Pendampingan Pendiplaan Produk Kreatif (Inkubasi)	Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	-		-		
3.26.05.1.01.0012	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	-		-		
3.26.05.1.01.0015	Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah	Jumlah Orang Aparatur Pemerintah Daerah Yang Mendapatkan Diklat Tehnis Kepariwisata	21,801,000		-		

3.26.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDMPariwisata Berbasis SKKN	Jumlah SDMPariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKN	380,088,467	20	169,121,365		
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mandiri	587,583,308		126,144,975		
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang	443,576,905				
3.26.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang disertifikasi kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	144,006,403	25	126,144,975		
3.26.05.1.02.0005	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah orang mengikuti pelatihan asesor kompetensi/workplace asesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	-		-		
3.26.05.1.02.0006	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah lembaga sertifikasi profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif Yang Terfasilitasi Pendiriannya sampai sah dan legal	-				

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis. Rencana kerja merupakan kondisi yang realistis secara menyeluruh yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 tergantung pada sikap, mental, tekad serta semangat dan disiplin para pelaksana. Meninjau keberhasilan bukan hanya pada *output* tapi sampai pada *outcome* merupakan cara yang baik sebagai Badan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang keparwisataan dan ekonomi kreatif yang arahnya sebagai pedoman dalam penyusunan rencana belanja tiap-tiap bidang yang saling berkaitan dalam pencapaian target Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Peningkatan Kinerja Dinas Pariwisata secara terus menerus dengan perbaikan mekanisme dan standar mutu pelayanan yang sesuai menjadi perhatian penting dalam arah kebijakan Pembangunan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.